



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

**Tabel T-B.35.**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)



- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran Renstra PD.
- Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi.
- Kolom (4) diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan.

Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
- (2) Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
- (3) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (4) Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;



- (5) Hasil Rekomendasi Penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD maupun Kabupaten/Kota terkait.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 dalam masa kepemimpinannya adalah **“Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”**

Sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sementara berkeadilan adalah pembangunan yang adil dan merata serta penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah



4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
5. . Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA) Jilid II, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih proporsional sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

Program unggulan GERBANG RAJA merupakan program yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Adapun program unggulan Gerbang Raja, antara lain : Program Pembangunan Pemerintahan, Program Pengembangan Pendidikan, Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Program Pembangunan Infrastruktur, Program Pembangunan Ekonomi, Program Ketenagakerjaan, Program Pembangunan Pertanian, Program Pemuda dan Olah Raga, Program Pengembangan Pariwisata, Program Pembinaan Kehidupan Beragama, Program Pelestarian Lingkungan Hidup, Program Pemberdayaan Perempuan dan Gender.

Berbagai program unggulan tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian Misi GERBANG RAJA JILID II dan dilaksanakan oleh OPD, lintas OPD dan Lintas Wilayah. Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka merupakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga



*think-tank* untuk mengawal dan mempercepat perwujudan Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada dasarnya melaksanakan program yang mendukung pencapaian seluruh Misi yang ada. Hal ini dikarenakan ruang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mencakup seluruh sendi strategis Pembangunan Daerah yang memerlukan dukungan Riset dan Inovasi. Dari misi yang telah ada, maka Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Misi Bupati diantaranya adalah Penelitian terkait, sebagai berikut :

<b>Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021</b>	<b>Sasaran Pembangunan</b>
Misi Pertama : <i>Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempertahankan Opini WTP oleh BPK RI</li><li>2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, LAKIP A</li><li>3. Meningkatkan Peringkat Nilai LPPD Secara Nasional</li><li>4. Menurunkan Indeks Persepsi Korupsi</li><li>5. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat</li></ol>
Misi Kedua : <i>Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan IPM</li><li>2. Menurunkan Jumlah Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan</li><li>3. Menurunkan Jumlah Pengangguran</li></ol>
Misi Ketiga : <i>Meningkatkan pembiayaan</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan PAD</li><li>2. Meningkatkan Sinergitas Dana CSR</li></ol>



<i>pembangunan daerah</i>	Terhadap Pembangunan Daerah 3. Meningkatkan Jumlah Investasi PMDN/PMA 4. Meningkatkan Peran Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik
Misi Keempat : <i>Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah</i>	1. Pertumbuhan sektor pertanian meningkat 2. Kunjungan wisata meningkat 3. Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batu Bara Meningkat 4. Pembentukan kawasan-kawasan strategis pertanian dan pariwisata 5. Pertumbuh Industri pengolahan pertanian meningkat
Misi Kelima : <i>Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah</i>	1. Konektivitas antar kecamatan, antar desa meningkat 2. Meningkatkan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah pemukiman 3. Jaringan layanan internet meningkat hingga ke daerah-daerah non perkotaan
Misi Keenam : <i>Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</i>	1. Ketersediaan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk meningkat 2. Ketersediaan energi listrik baru terbarukan di daerah-daerah tidak terjangkau PLN meningkat
Misi Ketujuh : <i>Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak</i>	1. Meningkatkan IPG/IDG 2. Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi



	Perempuan
--	-----------

Berdasarkan tujuh Misi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu OPD Pelaksana Utama dan Pendukung dalam pencapaian keseluruhan Misi tersebut dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mewujudkan Misi sekaligus Visi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi dan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Timur**

Demi tercapainya sinergitas kegiatan kelitbangan serta *outcome* yang luas, maka penyusunan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi sebagai ujung tombak pengembangan dunia Kelitbangan di tanah air. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan pembangunan Iptek Nasional, perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting, karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya yang diambil.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi, maka pembangunan Iptek ke depan harus diarahkan kepada peningkatan kontribusi Iptek secara langsung dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan Negara. Sehingga dilahirkanlah Visi Kementerian Riset dan Teknologi dalam



pembangunan Iptek 2010 – 2014 yaitu “Iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban”

Deskripsi Iptek untuk kesejahteraan dimaksudkan dengan kemajuan Iptek Nasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian Bangsa. Kemajuan Iptek mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan bencana, peningkatan pertahanan dan keamanan, dll, yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi Iptek untuk kemajuan peradaban dimaksudkan dengan kemajuan Iptek Nasional yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hasil-hasil Litbang harus mencerminkan *academic excellence*, mempunyai *economic value*, dan memberikan *social impact* yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditetapkan Misi Kementerian Riset dan Teknologi yaitu:

1. Memperkuat daya dukung Iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia.
2. Meningkatkan Penelitian, Pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.

Urgensi untuk Pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak dapat lagi ditampik, karena hanya ada satu pilihan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, yakni meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian Iptek Nasional. Iptek yang dimaksud adalah Iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di segala bidang.





Kontribusi teknologi yang nyata terhadap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat dan memajukan peradaban akan terwujud apabila terbangun sebuah sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim yang mendorong inovasi di tanah air yang dikenal sebagai sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas). Karena itulah arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui: (1) Kelembagaan iptek yang efektif, (2) Sumberdaya iptek yang kuat, (3) Jaringan antar-kelembagaan iptek yang saling memperkuat (mutualistik), (4) Relevansi dan produktivitas Iptek yang tinggi, dan (5) Pendayagunaan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset dan Teknologi, rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga perlu memperhatikan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk saling *men-support* dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi.

Dalam rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama kegiatan Penelitian dan Pengembangan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan stakeholders.



3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung Penelitian dan Pengembangan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pemanfaatan hasil-hasil (rekomendasi) Litbang.
5. Meningkatkan Sumberdaya Manusia / Sumberdaya Aparatur

Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa strategi pembangunan. Adapun strategi yang fokus pada Penelitian dan Pengembangan ditegaskan dalam strategi 6 yaitu Penelitian dan Pengembangan IPTEK; strategi 7 yaitu Pemanfaatan dan penggunaan hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan strategi 8 yaitu Peningkatan dan penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari strategi-strategi tersebut kemudian diuraikan ke dalam beberapa arah kebijakan yang sangat penting dalam menguatkan posisi kelitbang di daerah. Adapun arah kebijakan dalam strategi 6 yaitu :

1. Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpercaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, pengembangan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik
2. Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu
3. Peningkatan mutu sumberdaya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pengembangan dan penguatan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan arah kebijakan dalam strategi 7 yaitu :



1. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
2. Pemanfaatan penerapan hasil penelitian serta pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien
3. Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan sebagai dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah, dan tanpa hambatan

Selanjutnya arah kebijakan dari strategi 8 yaitu Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga litbang dalam penelitian pembangunan; dan Peningkatan kerjasama bidang Penelitian dan Pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

Keseluruhan arah kebijakan tersebut di atas ditetapkan dalam rangka meningkatkan Penelitian dan Pengembangan IPTEK di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta pemanfaatan penggunaan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Seperti diketahui bahwa dokumen Renstra Kelitbang diperlukan untuk memberikan penguatan sekaligus menjamin kualitas kebijakan di tataran Pemerintahan Daerah. Melalui Renstra Kelitbang ini akan diperoleh kejelasan arah dan kepastian waktu dalam upaya menuju penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, melalui Renstra Kelitbang dapat dipastikan tersusunnya kebijakan Pemerintah yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai strategi pembangunan nasional yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi Pemerintah maka Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, arah kebijakan



strategis pengembangan kelitbangan baik pusat, provinsi, maupun daerah dapat saling menunjang demi peningkatan dan kemajuan daerah dan bangsa.

Arah kebijakan strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya secara implisit telah diungkapkan dalam beberapa Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, namun tetap disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan serta kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Ketiga aspek tersebut harus mampu diintegrasikan dalam menyusun kegiatan kelitbangan daerah sehingga



pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

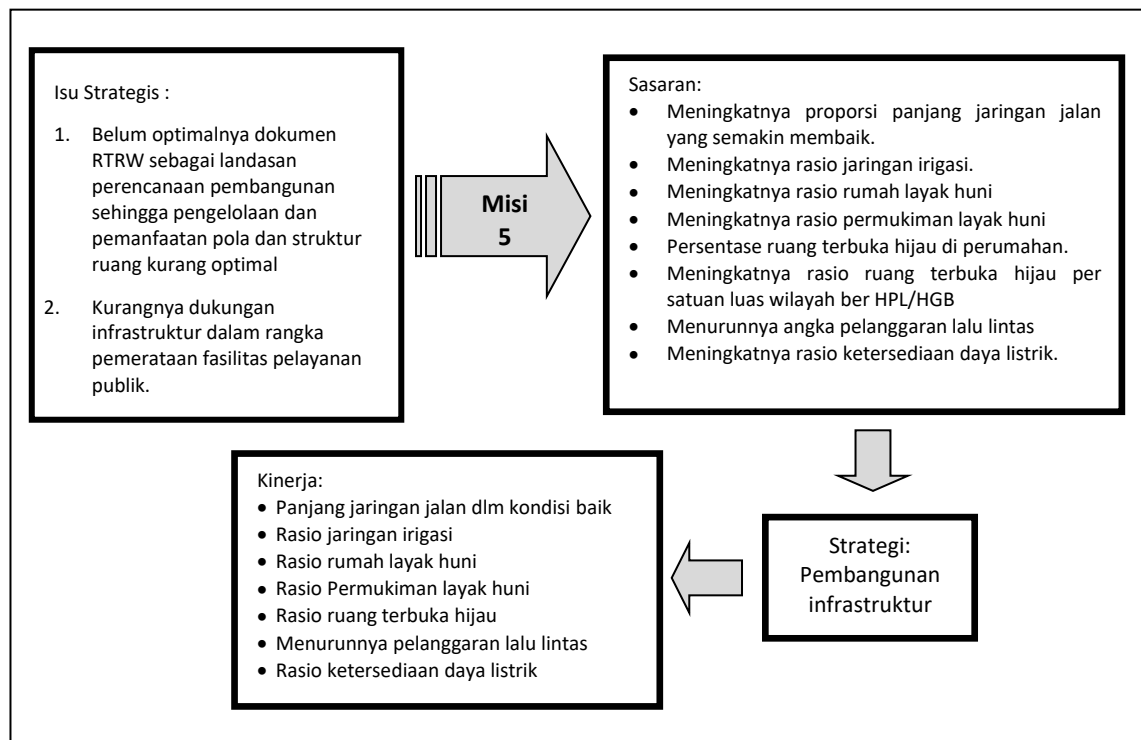
Saat ini harus diakui bahwasanya peran sumber daya alam sangat penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah ke depan. Tingginya peran sumber daya alam dalam perekonomian daerah telah memicu pola produksi yang eksploitatif dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengimplementasikan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan serta solusi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Unsur penting lainnya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah hendaknya memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Keserasian dengan RTRW ini sangat penting sebab RTRW memetakan wilayah-wilayah yang bisa dan tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dengan pertimbangan kelestarian lingkungan. Sehingga peran ganda sumber daya alam, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan dapat berjalan dengan baik.



Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, sebagaimana yang tercantum dalam Misi 5 di RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan publik. Oleh Karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu memperhatikan kondisi ini dengan instrumen pembangunan infrastruktur untuk mengintegrasikan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pengurangan kesenjangan pelayanan dan sebagai pembuka keterisolasian antar wilayah, sebagaimana tersaji pada gambar 3.1 berikut ;



**Gambar 3.1 Strategi Pembangunan Infrastruktur**

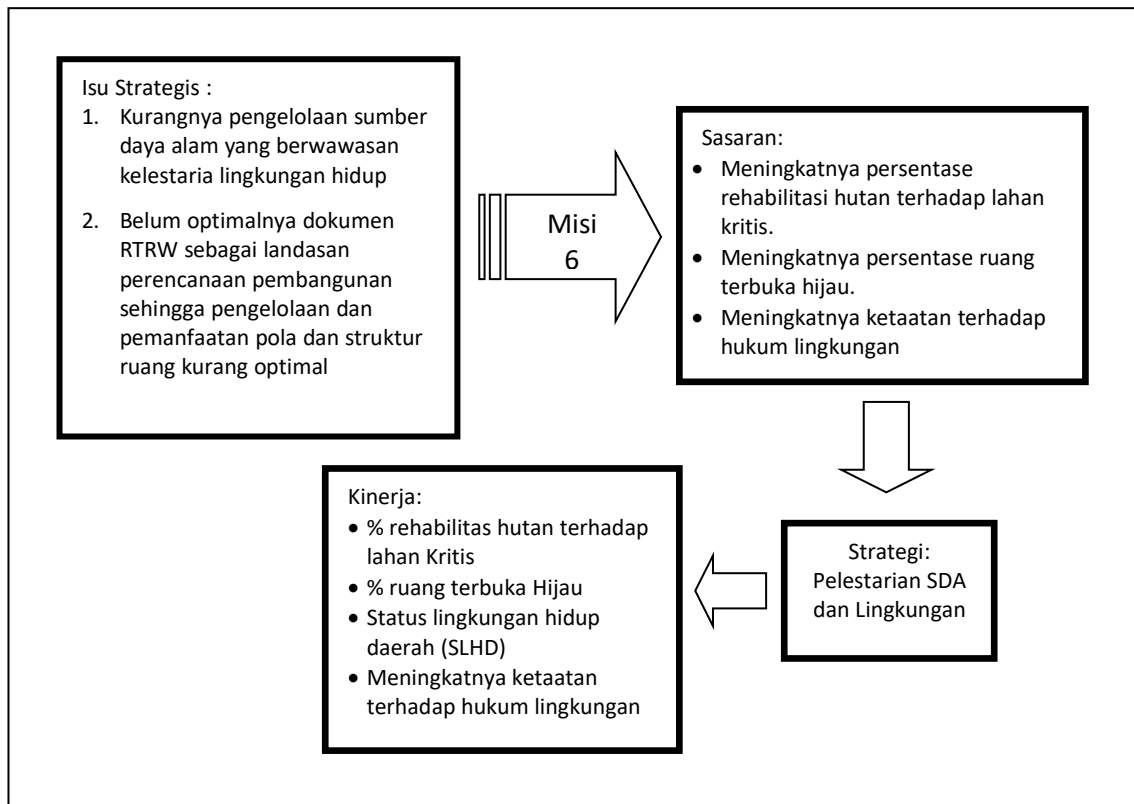
Hal utama yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Misi ke-6 diuraikan bahwa diperlukan untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi



## **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

*Rencana Strategis 2016-2021*

dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dengan demikian, sasaran kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada langkah-langkah pelestarian lingkungan hidup, seperti terlihat dalam Gambar 3.2 berikut ;



**Gambar 3.2 Pelestarian SDA dan Lingkungan**

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

#### **3.5.1. Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini**

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, yaitu:

1. Pemahaman akan tugas dan fungsi kelitbangan dalam tubuh organisasi masih kurang dapat dipahami dan diinternalisasi secara optimal oleh sebagian aparaturnya. Dorongan dan upaya untuk melakukan inovasi dan kegiatan-kegiatan yang sarat unsur kelitbangan masih minim dilakukan. Kondisi ini tentu mempengaruhi output yang dihasilkan serta pencapaian kualitas yang tinggi terhadap hasil-hasil kelitbangan. Kenyataan ini cukup paradoks dengan komitmen kepala daerah yang secara tegas telah





- mengeluarkan kebijakan agar semua kegiatan kelitbangan perlu dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Terbatasnya jumlah tenaga fungsional peneliti dan perekayasa dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis kelitbangan daerah. Masih kurangnya minat aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menjadi tenaga fungsional peneliti dan perekayasa menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan yang tentu sangat membutuhkan peran tenaga fungsional tersebut.
  3. Jaringan kelitbangan yang perlu semakin diperkuat dan dioptimalkan kemanfaatannya. Saat ini jaringan kelitbangan (Jarlitbang) antar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan lembaga litbang lainnya telah terbangun, namun dirasakan bahwa peran Jarlitbang ini masih kurang dimanfaatkan terutama terkait kerjasama dan koordinasi kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan.
  4. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelitbangan turut mempengaruhi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah saat ini. Unsur penunjang tersebut utamanya adalah belum tersedianya laboratorium IPTEK dan infrastruktur TIK yang masih minim.

### **3.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan**

Isu dan permasalahan Penelitian dan Pengembangan Daerah lima tahun ke depan lebih menekankan pada:

1. Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta masih besarnya aspek dan potensi kelitbangan yang belum tersentuh oleh kegiatan-kegiatan kelitbangan menjadi catatan tersendiri bagi optimalisasi peran unit litbang daerah;
2. Perkembangan tingkat pendidikan masyarakat tentu mempengaruhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama pada aspek pelayanan publik yang lebih bermutu dan prima. Kondisi ini tentu membutuhkan kajian/ penelitian yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;



3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu perlu disikapi oleh lembaga litbang dengan menciptakan terobosan-terobosan yang dapat semakin mengefektifkan dan mengefisienkan pola kerja atau proses kerja Pemerintahan Daerah;
4. Isu-isu Nasional dan Global seperti perubahan iklim (*climate change*) dan perdagangan bebas tentu menjadi bahan masukan bagi lembaga litbang dalam mempersiapkan kebijakan preventif dalam menghadapinya serta mengupayakan dukungan penguatan daya saing daerah;
5. Semakin terbatasnya sumber daya alam Kutai Kartanegara akibat adanya illegal logging, pembukaan areal perkebunan dan pertambangan yang tidak mengindahkan konservasi lingkungan membutuhkan formulasi kebijakan yang dirancang melalui proses penelitian/ kajian yang komprehensif terutama dalam hal tata ruang daerah untuk melindungi aset daerah berupa kekayaan alam tersebut;

### **3.5.3. Analisis Lingkungan Strategis**

Dalam konteks manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini, identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarannya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT



(Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, Analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi – atau unit organisasi – dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya (Rangkuti, 1998).

Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan internal (Analisis Lingkungan Internal, ALI) yang meliputi kekuatan (strength) serta kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan eksternal (Analisis Lingkungan Eksternal, ALE) yang meliputi peluang (opportunity) serta ancaman (threat) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal organisasi yang sifatnya controllable. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.

#### **3.5.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal**

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi mutlak dilakukan karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sarannya. Identifikasi dan penilaian faktor lingkungan organisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Penggunaan analisis SWOT guna mencermati kondisi organisasi baik internal maupun organisasi relevan untuk dilakukan. Hasil analisis sebelumnya di **tahun 2010** mencermati bahwa **kekuatan** (*strength*) yang dimiliki Badan



Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara pada landasan hukum yang kuat akan organisasi, yakni Adanya Peraturan Perundang-undangan (Perda No.18/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang strategis serta cukup tersedianya dana dan sarana prasarana pendukung, sementara organisasi juga menyadari akan cukup banyaknya **kelemahan** (*weakness*) berupa struktur organisasi yang belum mapan, kualitas serta kuantitas SDM aparatur yang masih belum memadai serta belum optimalnya fungsi perencanaan program termasuk belum tersedianya data base sebagai penunjang tugas-tugas penelitian dan pengembangan. Faktor eksternal yang bersifat *uncontrollable* yang dicermati menjadi peluang yang harus ditangkap oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara berupa kebijakan/*goodwill*/dukungan Bupati terhadap eksistensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, perkembangan IPTEK, serta potensi sumber daya alam daerah. Faktor yang disadari akan menjadi ancaman bagi perkembangan/perbaikan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi lemahnya koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan, globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi, serta belum memasyarakatnya kelembagaan dan program Litbang.

Berbagai perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi menyebabkan terjadi beberapa pergeseran terhadap faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi :

### **Lingkungan Internal**

Untuk mendukung profesionalisme lembaga litbang, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah pembenahan internal oleh lembaga litbang sendiri.

Peraturan daerah No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas penelitian dan



pengembangan daerah. Dukungan peraturan ini menguatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, serta melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah. Domain litbang semakin kuat dengan perlunya naskah akademik (*academic paper*) disusun sebelum penetapan Peraturan-Peraturan Daerah, Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan (internal) yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Faktor lain yang juga menjadi kekuatan (*strength*) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah posisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai *leading sector* koordinasi perencanaan kegiatan kelitbang daerah. Aspek perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan. Proses penyusunan perencanaan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat/aspirasi masyarakat luas dan berdasar pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>1</sup> Ini menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk melakukan kegiatan riset unggulan daerah yang merupakan kemitraan lembaga litbang, industri dan pemerintah. Dan posisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, berdasar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 menjadi *leading sector* koordinasi perencanaan kegiatan kelitbang daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kewenangan yang cukup besar ini juga didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai yang masih disadari sebagai kekuatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas kelitbang.

Upaya optimalisasi peran litbang tentunya harus didukung dengan kualitas (serta kuantitas) SDM aparatur khususnya aparatur kelitbang yang memadai. Namun, organisasi menyadari bahwa hingga saat ini salah satu kelemahan yang harus segera diminimalisir adalah pada aspek SDM khususnya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa yang masih belum optimal. Hingga

---

<sup>1</sup> [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id), 2012, *Sinergitas Kebijakan Program Penelitian Dan Pengembangan Antara Pusat Dan Daerah Provinsi Jatim*, diunduh 24 April 2012



tahun 2017 ini, jumlah tenaga peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar hanya sebanyak 4 (empat) orang dan belum memiliki tenaga fungsional perekayasa yang tentu sangat urgen dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kelitbang di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah tenaga fungsional ini masih sangat kurang untuk mendukung upaya optimalisasi peran litbang daerah. Mindset SDM yang belum seluruhnya berorientasi pada kelitbang juga menjadi penghambat/kelemahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Mindset SDM kelitbang untuk kritis menganalisis, berpikir ilmiah masih perlu 'dipupuk' untuk mendukung perbaikan organisasi.

Perkembangan IPTEK yang sebelumnya dicermati sebagai peluang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, memberikan kesadaran bahwa infrastruktur TIK yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar masih belum optimal bahkan belum tersedia laboratorium IPTEK Daerah. Pembenahan infrastruktur TIK menjadi hal yang penting untuk menunjang dan memancing Peneliti serta Perekayasa untuk berimprovisasi dalam bekerja dan menghasilkan suatu produk litbang. Selain aspek SDM dan infrastruktur, aspek ketatalaksanaan sebagai salah satu aspek penting keberhasilan organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien agar misi yang diemban organisasi dapat diwujudkan, SOP sebagai salah satu 'alat' perbaikan ketatalaksanaan organisasi masih belum diimplementasikan dengan optimal.

Adalah penting untuk menyiapkan sumberdaya manusia, sistem dan pendanaan yang memadai untuk mendukung profesionalisme lembaga litbang. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah menghasilkan hasil-hasil litbang yang memiliki kualitas akademis yang memadai dan secara konkrit berkontribusi mengatasi masalah yang dihadapi.



### **Lingkungan Eksternal**

Eksistensi kelitbangan di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkuat dengan cukup luasnya jaringan/ *networking* kelitbangan yang terbangun, termasuk keberadaan dewan riset daerah yang terus eksis. Sinergitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kelitbangan lainnya menjadi peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Kerjasama-kemitraan dengan lembaga penelitian tidak hanya bertujuan mempererat hubungan dan kolaborasi antar lembaga penelitian, namun yang terpenting adalah bahwa hasil penelitian tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata (*applied research*).

Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian juga menjadi peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk optimalisasi kinerja organisasi. Kebijakan pemerintah dalam mendukung profesionalisme lembaga litbang, yang bersifat langsung, secara eksplisit dicantumkan dalam tiga paket peraturan perundang-undangan, yakni :<sup>2</sup>

- (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi.
- (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional

Kebijakan-kebijakan ini tentunya memberi kewenangan, dan mengarahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk semakin meningkatkan kiprah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Urgensi peran Penelitian dan Pengembangan di daerah juga tercermin dalam cukup banyaknya cakupan kegiatan kelitbangan yang dapat dilakukan

---

<sup>2</sup> Makhdom Priyatno, Peran Pemerintah dalam Mendukung Profesionalisme Lembaga Litbang, Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kajian yang dilaksanakan oleh PKP2A III Lembaga Administrasi Negara di Samarinda, tanggal 27 Maret 2012



oleh lembaga litbang di daerah Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi peluang lainnya bagi organisasi. Sesuai Permendagri No 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yakni pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi, kesatuan bangsa dan politik lokal, penataan wilayah, kependudukan dan catatan sipil, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan/masalah aktual sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan daerah.

Dalam hal tuntutan/harapan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian yang semakin tinggi, di satu sisi menjadi peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, namun tuntutan ini di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi Balibangda mengingat kondisi internal yang belum mampu menghasilkan kinerja optimal atau bisa dikatakan belum mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil litbang.

Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan mampu menjadi *resource center* atau 'bank data/informasi' bagi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan di daerahnya. Untuk dapat berperan sebagai *resource center* di daerah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut mampu melakukan berbagai inovasi dan kreativitas serta mampu memerankan dirinya dalam membangun manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Upaya mewujudkan daya saing daerah memerlukan sinergi seluruh komponen kelitbangan yang ada di daerah, baik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, lembaga riset Kementerian yang berada di daerah, Dewan Riset Daerah maupun perguruan tinggi serta lembaga-lembaga kelitbangan swasta lainnya. Namun, keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten serta kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM dapat menjadi ancaman bagi Badan Penelitian dan





## **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

*Rencana Strategis 2016-2021*

Pengembangan Daerah, karena seharusnya Litbang daerah-lah yang merupakan 'otak'nya Pemerintahan Daerah.



**Tabel 3.1. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

<b>FAKTOR INTERNAL</b>			
<b>No</b>	<b>Strength</b>	<b>No</b>	<b>Weakness</b>
S1	Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	W1	Infrastruktur TIK yang belum optimal dan belum tersedianya laboratorium IPTEK Daerah
S2	Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	W2	Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal
S3	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi <i>leading sector</i> koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah	W3	Mindset SDM belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan
S4	Tersedianya dana yang memadai	W4	Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
		W5	<i>Internal Work Process</i> seperti SOP yang belum diimplementasikan dengan optimal
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>			



No	Opportunities	No	Threat
O1	Jaringan/ networking kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset daerah)	T1	Tuntutan stakeholders terhadap publikasi hasil litbang
O2	Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian	T2	Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi
O3	Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	T3	Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten
O4	Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi	T4	Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM

Dari identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian ditentukan nilai urgensi dan bobot faktor untuk masing-masing faktor kondisi lingkungan, serta nilai dukungan dan nilai bobot dukungan. Nilai Urgensi (NU) merupakan nilai yang menentukan seberapa urgen/penting faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pencapaian visi organisasi, digunakan Skala Likert antara 1-5 untuk menentukan urgensi masing-masing faktor. Kemudian Bobot Faktor (BF) dihasilkan dengan rumus  $BF = NU / \sum NU \times 100\%$ . Dari hasil penilaian terhadap urgensi dan bobot faktor diperoleh tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Nilai Urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF) dari Setiap Faktor**

**Lingkungan Internal dan Eksternal**

<b>STRENGTH</b>	<b>NILAI URGENSI (NU)</b>	<b>BOBOT FAKTOR (BF)</b>
S1	5	$5 / 39 \times 100\% = 12,82 \%$
S2	5	$5 / 39 \times 100\% = 12,82 \%$
S3	4	$4 / 39 \times 100\% = 10,26 \%$
S4	4	$4 / 39 \times 100\% = 10,26 \%$
<b>WEAKNESSES</b>		
W1	4	$4 / 39 \times 100\% = 10,26 \%$
W2	5	$5 / 39 \times 100\% = 12,82 \%$
W3	4	$4 / 39 \times 100\% = 10,26 \%$
W4	5	$5 / 39 \times 100\% = 12,82 \%$
W5	3	$3 / 39 \times 100\% = 7,69 \%$
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>100 %</b>
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>NILAI URGENSI (NU)</b>	<b>BOBOT FAKTOR (BF)</b>
O1	4	$4 / 30 \times 100\% = 13,33 \%$
O2	3	$3 / 30 \times 100\% = 10 \%$
O3	4	$4 / 30 \times 100\% = 13,33 \%$
O4	5	$5 / 30 \times 100\% = 16,67 \%$
<b>THREATS</b>		
T1	3	$2 / 30 \times 100\% = 10 \%$
T2	3	$1 / 30 \times 100\% = 10 \%$
T3	4	$2 / 30 \times 100\% = 13,33 \%$
T4	4	$2 / 30 \times 100\% = 13,33 \%$
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

*Keterangan : Bobot Faktor (BF) =  $NU / \Sigma NU \times 100\%$*

Sedangkan Nilai Dukungan (ND) merupakan penilaian terhadap seberapa besar kondisi nyata yang ada saat ini berpengaruh terhadap pencapaian visi organisasi, digunakan Skala Likert antara 1-5 untuk menentukan dukungan masing-masing faktor. Nilai Bobot Dukungan (NBD) dihasilkan dengan perhitungan rumus  $NBD = ND \times BF$ . Nilai dukungan dan nilai bobot dukungan ditentukan sebagai berikut:



**Tabel 3.3. Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (DBD) dari Setiap Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal**

<b>STRENGTH</b>	<b>NILAI DUKUNGAN (ND)</b>	<b>NILAI BOBOT DUKUNGAN (NBD)</b>
S1	4	0,51
S2	5	0,64
S3	2	0,21
S4	3	0,31
<b>WEAKNESSES</b>		
W1	2	0,21
W2	2	0,26
W3	2	0,21
W4	3	0,38
W5	2	0,15
<b>OPPORTUNITY</b>		
O1	4	0,53
O2	3	0,30
O3	3	0,40
O4	4	0,67
<b>THREATS</b>		
T1	3	0,30
T2	2	0,20
T3	4	0,53
T4	4	0,53

*Keterangan : Nilai Bobot Dukungan (NBD) = ND x BF : 100*

Dari kesemua faktor baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut selanjutnya ditentukan nilai keterkaitan (NK), yaitu seberapa besar



keterkaitan masing-masing faktor tersebut satu sama lainnya dengan menggunakan Skala Likert antara 1-5. Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK) masing-masing faktor yang telah dijumlahkan tersebut dikalikan dengan bobot faktor dari masing-masing faktor sehingga menghasilkan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK). Penjumlahan antara NBD dan NBK menghasilkan Total Nilai Bobot (TNB).



**Tabel 3.4. Nilai Keterkaitan Antara Masing-Masing Faktor**

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD (BF x ND)	Nilai Keterkaitan																	NRK ( $\sum$ NK/n-1)	NBK (BF x NRK)	TNB (NBD +NBK)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>S</b>	<b>Strength</b>																							<b>3,60</b>
1	Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	12.82	4	0.51	5	5	5	4	5	3	3	3	4	5	4	4	2	2	2	3.93	0.50	1.02		
2	Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.82	5	0.64	5	5	5	5	3	3	4	2	4	4	5	4	4	3	3	3	4.13	0.53	1.17	
3	Badan Penelitian dan	10.26	2	0.21	5	5	3	4	5	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	4.33	0.44	0.65	



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

*Rencana Strategis 2016-2021*

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD (BF x ND)	Nilai Keterkaitan																	NRK ( $\sum$ NK/n-1)	NBK (BF x NRK)	TNB (NBD +NBK)			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	Pengembangan Daerah menjadi leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah																										
4	Tersedianya dana yang memadai	10.26	3	0.31	5	5	3		5	4	3	5	3	4	3	5	5	5	4	4	4	4.47	0.46	0.77			
<b>W</b>	<b>Weakness</b>																							<b>3,51</b>			
5	Infrastruktur TIK yang belum optimal dan belum tersedianya laboratorium IPTEK Daerah	10.26	2	0.21	4	5	4	5		5	3	5	4	3	3	4	5	3	3	4	4	4.27	0.44	0.64			
6	Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal	12.82	2	0.26	5	3	5	4	5		5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4.73	0.61	<b>0.86</b>			





**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

*Rencana Strategis 2016-2021*

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD (BF x ND)	Nilai Keterkaitan																	NRK ( $\sum$ NK/n-1)	NBK (BF x NRK)	TNB (NBD +NBK)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	Mindset SDM belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan	10.26	2	0.21	3	3	4	3	3	5	4	3	5	3	4	4	4	5	4	4	4.07	0.42	0.62	
8	Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD	12.82	3	0.38	3	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	3	5	5	4.60	0.59	0.97	
9	<i>Internal Work Process</i> seperti SOP yang belum diimplementasikan dengan optimal	7.69	2	0.15	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3.27	0.25	0.41	
<b>O</b>	<b>Opportunity</b>																						4,27	
10	Jaringan/ networking kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset	13.3	4	0.53	3	4	5	4	3	4	5	5	3	4	5	5	4	4	5	5	4.53	0.60	1.14	



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

*Rencana Strategis 2016-2021*

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD (BF x ND)	Nilai Keterkaitan																	NRK (Σ NK/n-1)	NBK (BF x NRK)	TNB (NBD +NBK)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	daerah)																											
11	Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian	10.0	3	0.30	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4		4	4	3	3	2	2	3.53	0.35	0.65				
12	Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.3	3	0.40	5	5	5	5	4	5	4	4	3	5	4		5	4	3	4	4	4.60	0.61	1.01				
13	Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian	16.7	4	0.67	4	4	4	5	5	5	4	5	3	5	4	5		5	4	5	5	4.80	0.80	1.47				



# BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rencana Strategis 2016-2021

No	Faktor Internal dan Eksternal	BF	ND	NBD (BF x ND)	Nilai Keterkaitan																	NRK ( $\sum$ NK/n-1)	NBK (BF x NRK)	TNB (NBD +NBK)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	dan Pengembangan Daerah mulai tinggi																											
<b>T</b>	<b>Threat</b>																											<b>3,48</b>
14	Tuntutan stakeholders terhadap publikasi hasil litbang	10.0	3	0.30	4	4	4	5	3	5	4	4	3	4	3	4	5		4	4	4	4.27	0.43	0.73				
15	Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi	10.0	2	0.20	2	3	3	4	3	4	5	3	2	4	3	3	4	4		4	5	3.73	0.37	0.57				
16	Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten	13.3	4	0.53	2	3	4	4	4	4	4	5	3	5	2	4	5	4	4		5	4.13	0.55	<b>1.08</b>				
17	Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM	13.3	4	0.53	2	3	4	4	4	4	4	5	3	5	2	4	5	4	5	5		4.20	0.56	<b>1.09</b>				



### **3.5.3.2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)/ Critical Success Factors**

Yang dimaksud faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK) atau *Critical Success Factors* (CSF) disini adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan Bappeda yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan atau Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil dari Analisa SWOT yang dilakukan pada tahap Analisa Strategi dan Pilihan (ASAP) dan merupakan hasil perpaduan faktor-faktor strategis lingkungan internal vs faktor-faktor lingkungan eksternal. Dengan kata lain, FPK atau Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) merupakan peringkat prioritas dari TNB terbesar dari masing-masing faktor.

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi atau unit kerja dalam mencapai visi misi dan tupoksinya. Dari setiap kategori strength, weaknesses, opportunities, dan threats masing-masing dipilih 2 (dua) FKK berdasarkan urutan TNB. Cara menentukan FKK dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- FKK dipilih dari nilai TNB terbesar
- Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar
- Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar
- Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar
- Bila masih sama, maka dipilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional (*Professional Judgement*).

Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor dapat disimak dalam tabel berikut :



**Tabel 3.5. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Urutan FKK	FAKTOR INTERNAL		
	Kekuatan - <i>Strength</i>		Kelemahan - <i>Weakness</i>
S1	Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	W1	Hasil-hasil / <i>outcome</i> penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
S2	Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	W2	Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal
Urutan FKK	FAKTOR EKSTERNAL		
	Peluang - <i>Opportunities</i>		Ancaman - <i>Threats</i>
O1	Tuntutan <i>stakeholders</i> terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan <i>stakeholder</i> terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi	T1	Kepercayaan <i>stakeholder</i> terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM
O2	Jaringan/ <i>networking</i> kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset daerah)	T2	Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten

Sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka berdasarkan hasil evaluasi, yang dipilih dari analisis SWOT adalah



- S : Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011
- W : Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
- O : Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi
- T : Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM

Berdasarkan Total Nilai Bobot (TNB) semua faktor, maka dapat dipetakan di posisi mana organisasi tersebut berada dan langkah strategi apa yang harus dilakukan.

#### **3.5.3.3. Analisis Strategi dan Pilihan ( ASAP )**

Analisis Strategi dan Pilihan (ASAP) merupakan evaluasi dan analisis lebih lanjut dan informasi yang telah dikembangkan pada tahap-tahap sebelumnya. Informasi tersebut sangat diperlukan dalam menentukan rangkuman kegiatan yang harus dilaksanakan dan harus berorientasi pada Misi dalam usaha menerapkan Visi.

Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempergunakan analisis SWOT sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategis yaitu :

1. Strategi *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
  - Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mendukung komitmen kepala daerah terhadap pembangunan
  - Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mensinergikan jaringan/ networking kelitbang yang telah terbangun untuk penguatan jaringan inovasi daerah
  - Optimalisasi pemanfaatan dukungan anggaran untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam penerapan reformasi birokrasi



2. Strategi *Strength–Threats* (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan/ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
  - Optimalisasi fungsi/kewenangan sebagai leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbangan yang telah terbangun
  - Optimalisasi fungsi/kewenangan didukung komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Strategi *Weaknesses–Opportunities* (WO), yaitu strategi memperkecil/ mengurangi *kelemahan* dengan memanfaatkan peluang yang ada.
  - Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam menghasilkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semakin berkualitas dan lebih aplikatif
  - Meningkatkan sinergi jejaring kelitbangan untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah
4. Strategi *Weaknesses–Threats* (WT), yaitu strategi memperkecil/ mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan/ancaman
  - Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memberikan kontribusi bagi penelitian di daerah dan bersinergi dengan peneliti dan perekayasa di lembaga/instansi penelitian lain.
  - Membangun sinergi dengan lembaga penelitian lainnya dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang langsung dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan SKPD guna meningkatkan pembangunan di daerah



**Formulasi strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Kutai Kartanegara**

	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>	
<b>FAKTOR INTERNAL</b>	1. Adanya kewenangan dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan daerah yang tertuang dalam Perda No. 10/2011	1. Infrastruktur TIK yang belum optimal dan belum tersedianya laboratorium IPTEK Daerah	
	2. Komitmen Bupati yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2. Kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa belum optimal	
	<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi <i>leading sector</i> koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah	3. Mindset SDM belum seluruhnya berorientasi pada kelitbangan
		4. Tersedianya dana yang memadai	4. Hasil-hasil /outcome penelitian yang belum diimplementasikan oleh SKPD-SKPD
		5. <i>Internal Work Process</i> seperti SOP yang belum diimplementasikan dengan optimal	
<b>PELUANG</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>	





1. Jaringan/ networking kelitbangan yang terbangun cukup luas (Termasuk keberadaan dewan riset daerah)	1. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mendukung komitmen kepala daerah terhadap pembangunan	1 Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam menghasilkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semakin berkualitas dan lebih aplikatif
2. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penelitian	2. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbangan yang telah terbangun untuk penguatan jaringan inovasi daerah	2 Meningkatkan sinergi jejaring kelitbangan untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah
3. Masih terbukanya atau banyaknya sektor/ aspek yang bisa disentuh oleh penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3. Optimalisasi pemanfaatan dukungan anggaran untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam penerapan reformasi birokrasi	3
4. Tuntutan stakeholders terhadap kualitas hasil kajian semakin meningkat dan harapan		

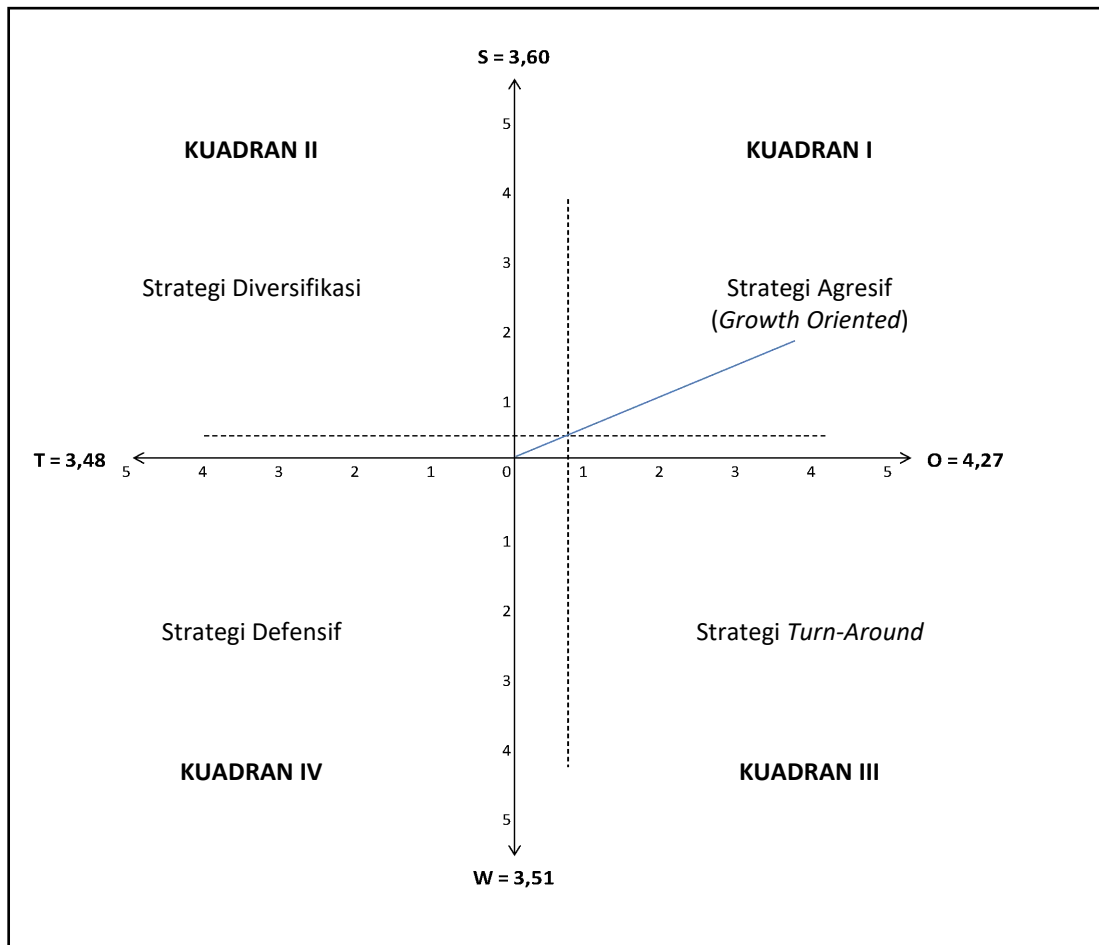


stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mulai tinggi		
<b>ANCAMAN</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
1. Tuntutan stakeholders terhadap publikasi hasil litbang	1. Optimalisasi fungsi/kewenangan sebagai leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbang untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbang yang telah terbangun	1. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memberikan kontribusi bagi penelitian di daerah dan bersinergi dengan peneliti dan perekayasa di lembaga/instansi penelitian lain.
2. Globalisasi yang dapat menjadi ancaman bila tidak mampu memiliki daya saing tinggi	2. Optimalisasi fungsi/kewenangan didukung komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2. Membangun sinergi dengan lembaga penelitian lainnya dalam menghasilkan penelitian-penelitian yang langsung dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan SKPD guna meningkatkan pembangunan di daerah
3. Keberadaan lembaga/instansi penelitian yang lebih kompeten		



4. Kepercayaan stakeholder terhadap lembaga/ instansi litbang pusat/LSM		
---	--	--

Dari penghitungan yang telah dilakukan terhadap semua faktor tersebut maka diperoleh jumlah TNB untuk masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nilai tertinggi untuk faktor internal dan nilai tertinggi untuk faktor eksternal menentukan posisi kuadran kondisi lingkungan strategis organisasi. Perhitungan yang telah dilakukan terhadap faktor di atas menghasilkan TNB untuk kekuatan adalah 3,60; kelemahan adalah 3,51; peluang adalah 4,27; dan ancaman adalah 3,48. Dengan demikian untuk faktor kondisi internal harus diakui bahwa faktor yang lebih dominan adalah kekuatan (*Streght*) sedangkan faktor eksternal lebih dominan faktor peluang (*Opportunity*). Posisi kuadran terletak pada kuadran *Strength–Opportunities* (SO), seperti pada gambar berikut:



**Gambar 3.1.**

**Peta Posisi Kekuatan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Diagram peta posisi kekuatan berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada kuadran *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi mengoptimalkan *kekuatan* dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar menyadari bahwa faktor lingkungan yang paling dominan adalah kelemahan dan peluang , sehingga strategi yang digunakan sebelumnya adalah strategi WO atau strategi Turn – Around (*Minimizing Internal problem Strategy*), yang berarti bahwa untuk dapat menjangkau dan memanfaatkan peluangnya, suatu organisasi harus dapat mendayagunakan seluruh potensi dan



kekuatan yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seiring dengan berbagai perubahan serta perbaikan kinerja Pemerintahan memicu terjadinya pergeseran strategi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kewenangan dan peluang yang dimiliki serta berbagai perbaikan internal yang dilakukan mengarahkan dirinya untuk berada pada strategi *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada, yakni dengan melakukan :

1. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mendukung komitmen Kepala Daerah terhadap pembangunan;
2. Optimalisasi fungsi/kewenangan untuk mensinergikan jaringan/networking kelitbangan yang telah terbangun untuk penguatan jaringan inovasi daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan dukungan anggaran untuk menjawab tuntutan stakeholder dalam penerapan reformasi birokrasi.